

## Membangun Masyarakat Seni Rupa yang Madani

oleh Amir Sidharta

Saat ini, kita sedang bersiap-siap menuju era Indonesia Baru. Di era baru itu, kekuasaan tidak boleh lagi ada di tangan pemerintah, tapi di tangan masyarakat yang madani yang berdaulat dan demokratis. Masalah masyarakat madani bukan semata-mata menyangkut kehidupan politis kita. Kita juga perlu masyarakat seni dan budaya yang madani. Dalam makalah ini kita khususkan pembahasan kepada masyarakat seni rupa yang madani.

Pembentukan masyarakat seni rupa yang madani ini menghadapi beberapa kendala. Di antaranya, adalah adanya ketegangan antara pihak akademisi dan pihak "pasar" atau pihak formal dan pihak informal dalam seni rupa yang tidak menghadirkan suasana yang kondusif bagi perkembangan seni rupa dan pembentukan masyarakat seni rupa. Jika pembentukan masyarakat seni rupa saja mendapat halangan, apalagi pembentukan masyarakat seni rupa yang madani. Selain itu, lembaga seni rupa formal cenderung menjadi birokrasi yang mengakibatkan eksklusifitas, sehingga masyarakat seni rupa terkotak-kotak.

Seperti kita ketahui, selama lebih kurang satu dasawarsa bersamaan dengan pertumbuhan perekonomian, seni rupa Indonesia mengalami boom. Pada masa ini (1987 - 1997), perkembangan pasar ini begitu pesat, sedang perkembangan pengetahuan dan keilmuannya tertinggal. Galeri-galeri seni rupa menjamur dan perdagangan seni marak. Sementara itu, walaupun seni rupa Indonesia diperkenalkan ke pemirsa Amerika Serikat melalui KIAS, di Indonesia sendiri lembaga museum dan penelitian seni rupa boleh dibilang tetap terlantar.

Namun, perkembangan pasar secara gradual juga memberikan tempat bagi perkembangan di bidang keilmuan. Pengelola galeri dan pialang seni rupa lama kelamaan mulai sadar juga bahwa mereka memerlukan dasar pengetahuan untuk dapat memasarkan karya-karya seni rupa secara lebih baik, dan untuk itu mereka perlu dukungan dari akademisi seni rupa. Pengelola galeri mulai melibatkan akademisi dalam penyiapan pameran dan penulisan katalog untuk melaksanakan tugas sebagaimana kurator di

museum. Sejak saat itulah kerja sama antara pihak "pasar" dan pihak akademisi seni rupa berkembang.

Hal itu menimbulkan masalah baru. Karena pameran biasanya dilaksanakan dalam rangka memasarkan seni rupa, ada beberapa "kurator" yang terjerumus dalam konflik kepentingan. Kurator-kurator tersebut, yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap aspek ilmiah seni rupa, merasa juga punya tanggung jawab juga untuk membantu patronnya dalam pemasaran seni rupa, sehingga timbul konflik tersebut.

Hal ini kemudian menimbulkan perselisihan antara para kurator. Kurator yang merasa diri mereka lebih idealis kemudian menganggap mereka yang lebih mengacu pada pasar sebagai pseudo-kurator atau kurator semu.

Lalu, juga muncul ketegangan antara akademisi dan galeri, apalagi setelah muncul perbedaan antara galeri biasa dan galeri alternatif. Dalam hal ini, yang dimaksud oleh kritikus yang memunculkan perbedaan ini dengan istilah galeri alternatif adalah galeri yang menghadirkan karya-karya perupa yang tidak atau jarang ditampilkan galeri biasa. Namun, kritikus itu juga mencantumkan pertimbangan nilai (*value judgement*) pada istilah tersebut: galeri alternatif yang benar karena tidak mengacu pada pasar, sedang galeri biasa bobrok karena terlalu mengacu pada pasar.

Seolah itu semua tidak cukup, kolektor pun kena kritik. Beberapa kritikus menilai kolektor itu bodoh karena hanya menjadi korban pengaruh galeri dan pedagang seni belaka. Mereka juga menilai bahwa kolektor itu hanya mampu melihat nilai investasi seni rupa saja.

Ulah kolektor sebagaimana yang dituduhkan itu yang dijadikan alasan agar perupa lebih cenderung melakukan penjualan karya seni rupa kepada museum seni rupa dan tidak lagi kepada kolektor, untuk menghindari komodifikasi seni rupa. Yang dimaksudkan dengan komodifikasi seni rupa adalah dijadikannya seni rupa sebagai barang dagangan untuk diperdagangkan semata. Ini memang harus dihindarkan. Namun, hal itu tidak sama dengan penjualan karya oleh perupa kepada kolektor, apakah itu melalui perantara pedagang seni atau tidak. Ini perlu dibedakan dengan jelas.

Sebagai akibat dari ketegangan antar pihak akademisi dan pihak "pasar", ada kecenderungan dari lembaga formal seni rupa yang ingin mempertahankan posisi mereka

sebagai lembaga yang "succi" dan berwibawa, sehingga mereka menempatkan diri pada kedudukan yang tinggi di menara gading, sehingga jauh di atas pihak "pasar" yang hina di bawah.

Pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan keberadaan mereka dalam lembaga seni rupa formal untuk menjadi penentu standar dan penentu nilai, sehingga mereka berhak melaksanakan seleksi karya. Hal itu tentunya wajar jika memang penyeleksian karya dilakukan berdasarkan pandangan dan kriteria yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun terlalu sering hak untuk melaksanakan penyeleksian karya ini disalahgunakan menjadi lebih didasarkan pada unsur jaringan persahabatan ketimbang pengamatan lapangan yang berdasarkan penelitian yang rinci dan teliti, sehingga cenderung eksklusif ketimbang inklusif. Yang lebih menyedihkan lagi, ada sistem yang sudah dibuat begitu eksklusifnya sehingga tidak ada lagi mekanisme yang memungkinkan disertakannya pihak-pihak yang sudah *diexclude* (ditempatkan diluar sistem).

Hal ini terjadi pada waktu Bienale Jakarta XI. Seorang perupa bertanya kepada seorang kurator bienale itu mengapa ia tidak diundang untuk ikut dalam pameran tersebut. Kurator itu menjawab bahwa untuk dapat berpameran dalam bienale itu, ia harus sudah pernah berpameran dalam bienale sebelumnya. Kalau memang itu syaratnya, bienale itu sudah tidak lagi memungkinkan masuknya peserta lain kecuali yang sudah masuk bienale tersebut (ini adalah *status quo* bidang seni rupa). Namun, ternyata ada satu peserta bienale tersebut yang sebenarnya belum pernah ikut bienale sebelumnya (sejenis KKN?). Jadi, apa yang menjadi prasyarat untuk dapat ikut Bienale Jakarta XI itu tidak jelas. Yang jelas pandangan kuratorial dan kriteria penyeleksian karya dalam bienale itu meracukan.

Penetapan standar dan kriteria yang terlalu kaku pun bisa menjadikan lembaga seni rupa formal menjadi birokrasi yang berfungsi untuk mempertahankan keadaan yang *pro status quo*. Contoh dari masalah ini mungkin dapat dilihat pada tahap awal terbentuknya tim kurator Galeri Nasional/ Gedung Pameran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berbeda dengan kuratorial Bienale Jakarta XI di mana kriterianya rancu, kriteria penyeleksian seniman yang dapat berpameran di Galeri Nasional begitu kakunya sehingga menjadi sangat eksklusif.

Untuk menciptakan suasana yang kondusif pada tumbuhnya masyarakat seni rupa yang madani, pandangan yang menimbulkan ketegangan antara pihak formal dan pihak informal dalam seni rupa perlu diturunkan. Tuduhan bahwa kolektor itu bodoh dan hanya tertarik pada segi investasi seni rupa itu bukan hanya salah, tapi juga menyesatkan dan tidak mendidik. Tentu, ada juga kolektor yang memang seperti yang dituduhkan itu, tapi tentu tidak semua kolektor begitu.

Memang sepantasnyalah jika kolektor yang hanya merupakan penikmat seni rupa pengetahuannya tidak sedalam dan seluas akademisi seni rupa yang memang profesinya meneliti seni rupa. Namun, mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang seni rupa merupakan *under-estimation* yang kurang bijak. Kolektor yang baik, tentunya tidak akan membeli karya seni rupa begitu saja. Mereka, yang biasanya merupakan pengusaha yang berhasil, pasti sudah pertimbangan yang matang berdasarkan penelitian yang memadai terhadap karya yang mereka akan beli.

Sambil belajar, tidak jarang kolektor yang baik pun memperbaiki dan mengembangkan koleksi mereka. Alhasil, koleksi mereka semakin lama semakin baik. Kita perlu ingat bahwa cikal bakal banyak museum di dunia adalah koleksi pribadi para kolektor. Di Amerika Serikat, National Gallery of Art di Washington berawal dari koleksi keluarga Paul Mellon, Museum Guggenheim di New York dari koleksi Solomon Guggenheim, Museum Getty di Los Angeles berasal dari keluarga Paul Getty, sedang di Indonesia, Museum Seni Rupa Jakarta berasal dari koleksi beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam Mitra Budaya.

Walaupun kita tidak dapat berharap agar tiap koleksi seni rupa kemudian menjadi koleksi museum, budaya koleksi perlu dikembangkan. Sebuah rumah tangga boleh dikatakan belum utuh jika belum dilengkapi karya seni. Dalam kehidupan sebuah keluarga, seni rupa menawarkan berkembangnya nilai rasa yang berhubungan erat dengan aspek spiritual manusia.

Mengkoleksi lukisan bukanlah semata-mata masalah apresiasi, gengsi atau investasi tapi juga merupakan suatu bentuk komunikasi antara pencipta karya seni dengan peminat atau penikmatnya, juga berperan dalam pembentukan identitas budaya modern, serta membangun nilai rasa dan spiritualitas dan bahkan juga moralitas dalam

masyarakat, dari unitnya yang terkecil yaitu keluarga, hingga masyarakat negara serta masyarakat dunia. Di Indonesia saat ini, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni rupa dapat pula berperan dalam membentuk masyarakat madani.

Komodifikasi seni rupa memang satu ekstrim yang perlu dihindari. Memang seni rupa tidak boleh menjadi barang dagangan untuk diperdagangkan semata. Namun, melarang penjualan karya seni rupa merupakan ekstrim lain yang tidak masuk akal. Antara perupa dan kolektor terdapat suatu hubungan saling menguntungkan yang unik, yang bukan sekedar urusan jual beli semata. Di satu pihak, perupa memerlukan kolektor untuk mengoleksi karyanya, agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, sehingga ia dapat terus mengembangkan kreatifitasnya. Di lain pihak meningkatnya apresiasi seni rupa peminat seni rupa yang lantas menjadi seorang kolektor biasanya melalui suatu proses yang berhubungan dengan urusan jual beli karya seni. Meningkatnya wawasan kolektor yang diharapkan terjadi, justru akan bisa tercapai dengan bantuan pasar seni rupa.

Dalam rangkaian ini, peran pihak pasar seni rupa merupakan bagian integral dari proses dan tahapan apresiasi seni rupa selengkapnyanya. Jual-beli karya seni rupa tidak secara otomatis mengakibatkan terjadinya komodifikasi seni rupa. Justru pasar seni rupa ini sangat berkaitan dengan proses meningkatnya wawasan peminat seni rupa secara umum. Oleh sebab itu, masyarakat seni rupa yang madani perlu mengikutsertakan bukan hanya perupa dan akademisi seni rupa saja, tetapi juga pemirsa seni rupa dari peminat rupa hingga kolektor, dan bahkan juga mereka yang berperan dalam pasar seni rupa. Mereka punya tempat dan peran masing-masing dalam pembentukan masyarakat seni rupa yang madani.

Galeri inilah jembatan yang secara langsung menghubungkan seni rupa kepada keluarga-keluarga, terutama keluarga dari masyarakat kelas menengah ke atas, dan selanjutnya masyarakat yang lebih luas. Galeri penting peranannya dalam memperluas apresiasi seni rupa di masyarakat.

Sebagai lembaga yang menjembatani seni rupa dan masyarakat, galeri dapat dan perlu ikut berperan dalam membina nilai moral dan spiritual dalam masyarakat melalui apresiasi seni rupa masyarakat. Galeri juga mendukung pemberdayaan seni rupa yang demokratis sesuai tujuan masyarakat madani karena lembaga seni rupa ini berkembang

melalui mekanisme pasar yang ditentukan oleh masyarakatnya, dan bukan ditentukan oleh lembaga seni rupa pemerintah.

Pembedaan galeri biasa dan galeri alternatif itu merupakan pandangan picik yang tidak ubahnya penciptaan stereotip Orde Baru. Ironisnya, galeri "biasa" pun sebenarnya sudah mulai memamerkan karya seni rupa yang dipamerkan di galeri "alternatif". Ironisnya, sementara galeri "biasa" memberikan tempat bagi pameran beragam karya, galeri "alternatif" justru cenderung tidak menawarkan alternatif. Seorang perupa yang karyanya sangat beragam dari yang lebih disukai pasar hingga yang lebih disukai akademisi mengaku bahwa galeri "alternatif" menolak memamerkan karyanya yang lebih disukai pasar. Sebenarnya, pemberian label galeri alternatif atau galeri biasa sebaiknya dihindari. Mungkin lebih baik kita menilai alternatif atau biasa itu dari karyanya, bukan dari tempat di mana karya itu dipamerkan.

Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah agar benar-benar dapat turut membentuk masyarakat madani melalui seni rupa, galeri tidak dapat berdiri sendiri. Galeri perlu menggalang hubungan yang strategis dan sinergetik dengan mitra-mitranya yang lain, terutama lembaga-lembaga seni rupa formal dan akademis, seperti universitas, dan museum, dan juga dengan para pengamat dan kritikus seni.

Lembaga formal seni rupa yang akademis tidak boleh lagi menjadi lembaga birokrasi seni rupa yang sifatnya eksklusif dan *pro status quo*. Sebaliknya, lembaga formal seni rupa itu harus mendukung inklusifitas dan pemberdayaan pihak yang selama ini tersisih. Karena penelitian, pameran dan penerbitan tentang seni rupa kita boleh dibilang masih terbatas dan timpang, maka penentuan kriteria perlu fleksibilitas. Selain itu, lembaga-lembaga formal seni rupa perlu mencegah terjadinya eksklusifitas yang sistematis dan justru menciptakan mekanisme yang memungkinkan kemajemukan secara sistematis. Bahkan, sistematika yang demokratis pun perlu dipertimbangkan.

Lembaga formal seni rupa yang berdasar akademis perlu menciptakan inklusifitas bersama-sama dengan galeri yang merupakan lembaga informal yang berkembang karena pasar. Ini juga salah satu cara demokratisasi seni rupa dapat pula dikembangkan.

Tapi sebenarnya yang terpenting bukanlah peran lembaga akademis atau pun lembaga informal. Yang terpenting justru berada pada ada pada diri masing-masing para

perupa. Mereka harus berniat untuk meraih kesempatan yang baik ini untuk memperdaya diri dalam masyarakat seni yang madani.

Selama Orde Baru, pembangunan terlalu ditekankan pada pembangunan fisik yang sifatnya simbolistis dan kurang memperhatikan pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih esensial. Pembangunan fisik yang menjadi fokus perhatian pemerintah Orde Baru ternyata tidak mampu menjamui kesejahteraan masyarakat secara luas, dan keadaan krisis yang kita alami sekarang ini merupakan bukti dari kelemahan tersebut.

Hal itu mengingatkan kita akan perlunya memperhatikan kembali pembangunan dan pembinaan aspek-aspek moral dan spiritual, agar yang disebut pada masa Orde Baru sebagai "pembangunan manusia seutuhnya" yang berimbang secara jasmani dan rohani bukan semata slogan atau retorika belaka. Pada masa paska Orde Baru ini, kita mendapat tantangan untuk membangun masyarakat madani (dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mungkin juga keadaan ekonomi kita mengalami krisis sementara ini dapat membuat kesenjangan antara perkembangan "pasar" dan akademis seni rupa berkurang, sehingga ketegangan antar kedua pihak itu juga dapat dihindari

Dalam masyarakat madani, daya cipta dan kebebasan berekspresi artistik dan intelektual dalam kehidupan budaya yang beragam harus dikembangkan. Di pandang dari segi hukum, kebebasan berekspresi artistik dan intelektual merupakan hak azasi manusia. Secara filosofis, ekspresi seni rupa adalah pencarian akan kebenaran demi kemanusiaan. Seni rupa menyampaikan perasaan, persepsi atau interpretasi yang merupakan cerminan atas realitas kehidupan kita.

Salah satu keindahan dari seni rupa ini adalah bahwa karya seni itu merupakan sesuatu yang tidak mengharuskan seorang melihat karya itu hanya dari satu sisi saja, tapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup luas bagi munculnya pelbagai interpretasi. Sehingga, dalam seni rupa kita tidak mengenal kebenaran tunggal Pancasila dalam Orde Baru yang sebegitu saktinya, sehingga tidak dapat dipertanyakan sedikit pun. Dalam seni rupa kita terbuka terhadap bermacam-macam pandangan, bahkan yang saling bertentangan sekali pun. Dalam masyarakat seni rupa yang madani, perlu terjadi

perupa. Mereka harus berniat untuk meraih kesempatan yang baik ini untuk memperdaya diri dalam masyarakat seni yang madani.

Selama Orde Baru, pembangunan terlalu ditekankan pada pembangunan fisik yang sifatnya simbolistis dan kurang memperhatikan pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih esensial. Pembangunan fisik yang menjadi fokus perhatian pemerintah Orde Baru ternyata tidak mampu menjamui kesejahteraan masyarakat secara luas, dan keadaan krisis yang kita alami sekarang ini merupakan bukti dari kelemahan tersebut.

Hal itu mengingatkan kita akan perlunya memperhatikan kembali pembangunan dan pembinaan aspek-aspek moral dan spiritual, agar yang disebut pada masa Orde Baru sebagai "pembangunan manusia seutuhnya" yang berimbang secara jasmani dan rohani bukan semata slogan atau retorika belaka. Pada masa paska Orde Baru ini, kita mendapat tantangan untuk membangun masyarakat madani (dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mungkin juga keadaan ekonomi kita mengalami krisis sementara ini dapat membuat kesenjangan antara perkembangan "pasar" dan akademis seni rupa berkurang, sehingga ketegangan antar kedua pihak itu juga dapat dihindari

Dalam masyarakat madani, daya cipta dan kebebasan berekspresi artistik dan intelektual dalam kehidupan budaya yang beragam harus dikembangkan. Di pandang dari segi hukum, kebebasan berekspresi artistik dan intelektual merupakan hak azasi manusia. Secara filosofis, ekspresi seni rupa adalah pencarian akan kebenaran demi kemanusiaan. Seni rupa menyampaikan perasaan, persepsi atau interpretasi yang merupakan cerminan atas realitas kehidupan kita.

Salah satu keindahan dari seni rupa ini adalah bahwa karya seni itu merupakan sesuatu yang tidak mengharuskan seorang melihat karya itu hanya dari satu sisi saja, tapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup luas bagi munculnya pelbagai interpretasi. Sehingga, dalam seni rupa kita tidak mengenal kebenaran tunggal Pancasila dalam Orde Baru yang sebegitu saktinya, sehingga tidak dapat dipertanyakan sedikit pun. Dalam seni rupa kita terbuka terhadap bermacam-macam pandangan, bahkan yang saling bertentangan sekali pun. Dalam masyarakat seni rupa yang madani, perlu terjadi

pendewasaan politik sehingga perbedaan pendapat dan pandangan tidak hancur menjadi perkelahian dan pertentangan fisik, tapi justru memunculkan wacana baru. Seni rupa dapat memperkaya pengetahuan, pemahaman dan penghayatan kita tentang masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat kita, sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai dan akhlak kita. Mudah-mudahan hal dapat disimak baik-baik oleh para perupa.

Dengan tumbuhnya nilai-nilai dan akhlak yang baik, keludupan bermasyarakat yang saling menghormati, saling menghargai, dan penuh dengan toleransi akan lebih terjamin. Secara langsung atau tak langsung, seni rupa turut memainkan peranan dalam pemberdayaan dan berkembangnya kedewasaan masyarakat, bukan hanya dalam bidang budaya, tapi juga dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi.